UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bedner, Adriaan W., 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Sebuah Studi Sosio-Legal)*, HuMa, Jakarta.

Dani, Umar, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable : Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta.

Djunaedi, Eddy, Edi Rohaedi, Kadar Slamet, 2003, *Mengkaji Kembali Pokok-pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, LPP-HAN, Jakarta.

Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.

Indra, Muhammad Ridwan, 1987, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manan, Bagir, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marbun, SF, dan Moh. Mahfud MD, *1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marbun, SF, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

_____, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Murad, Rusmadi, 2013, *Administrasi Pemerintahan : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Sarwono, 2017, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sodiki, Achmad dan Yanis Maladi, 2009, *Politik Hukum Agraria*, Mahkota Kata, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1990, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Eresco, Bandung.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penellitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

_____, 2010, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Utrecht, E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wiyono, R., 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Tesis

Berge, Gio Ten and Rob Widdershoven, "The Principle of Legitimate Expectation in Dutch Constitutional and Administrative Law", *http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2010-0518-200300/b22.pdf*, 2112013.

Hiariej, Eddy O.S., "Telaah Kritis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA No. 2608 K/PID/2006 dan 334 K/Pid.Sus/2009", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LeIP* '*Dictum'*, Edisi 5, Desember 2013.

Jebabun, Alfeus, "Penalaran dan Penemuan Hukum", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LeIP* '*Dictum'*, Edisi 5, Desember 2013.

Permatasari, Ifah Annisa, 2015, *"Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Penerapan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara di Kota Balikpapan"*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.

Wahyuni, Ajeng Tri, 2008, *"Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor: 57/PK/PID/2005; Putusan Nomor: 39/PK/PID/2006"*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 03).

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 1).

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 13 Seri E Nomor 13).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 26).

Peraturan Lain-lain

Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 591/2060/Perkot-Ptnh/2011 Tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Izin Membuka Tanah Negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 204/G/2011/PTUN-JKT antara Andru B. Subowo (Penggugat) melawan Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) dan PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk. (Tergugat II Intervensi).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 72/G/2012/PTUN-Medan antara Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (Penggugat) melawan Bupati Mandailing Natal (Tergugat).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2014/PTUN-PLK antara PT. Kharisma Tambang (Penggugat) melawan Bupati Barito Timur (Tergugat) dan PT. Gunung Cahaya Bersama (Tergugat II Intervensi).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2014/PTUN.SMD antara Amat Noor (Penggugat) melawan Walikota Balikpapan (Tergugat I) dan Siauw Budhi Sulistio Setiawan, Henny Yolanda, Husni P. Saberah (Tergugat Intervensi I, II dan II/Para Tergugat Intevensi).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2015/PTUN.SMD antara PT.Putra Tara Agung, Para Ahli Waris Ir. Dedy Sugianto (Penggugat I dan II/Para Penggugat) melawan Walikota Balikpapan (Tergugat I) dan Siauw Budhi Sulistio Setiawan, Henny Yolanda, Husni P. Saberah (Tergugat Intervensi I, II dan II/Para Tergugat Intevensi).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN DITERIMA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DJ HENDRA WINATA, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., L.L.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 87/G/2016/PTUN-PTK antara Firma Wahidah Trading & Minig Coy (Penggugat) melawan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat).

Website

Anonym, PTUN Jakarta, "Sejarah Pengadilan: Latar Belakang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)", *https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14*, tanggal akses: 1 Februari 2018.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, *https://putusan.mahkamahagung.go.id*., tanggal akses: 1 Februari 2018.

Humas, Kementerian Dalam Negeri RI, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan", 21 Juni 2016, *http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/*, tanggal akses 1 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, *https://kbbi.web.id/*, tanggal akses 1 September 2018.

Nursobah, Asep, "Pleno Kamar Berakhir, Rumusan Hukum pun Lahir", 11 Desember 2015, *https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1220-pleno-kamar-berakhir-rumusan-hukum-pun-lahir/*, tanggal akses 1 Oktober 2018.

Bahan Lainnya

Catatan perkuliahan "Politik Hukum" oleh Prof. Dr. Muchsan, SH., Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 2016.

_____, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2016.

Catatan perkuliahan "Hukum Tata Usaha Negara" yang diampu oleh Prof. Dr.Muchsan, SH, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 3 Maret 2017.

Catatan perkuliahan "Peradilan Tata Usaha Negara" yang diampu oleh Prof. Dr. Muchsan, SH., Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 9 September 2017.

Catatan "Workshop Peningkatan Keterampilan Penelitian Mahasiswa" Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung V.III.I FH UGM, Yogyakarta, tanggal 5 September 2018.